

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Definisi Kombinasi Bisnis**

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.22 tentang Kombinasi Bisnis paragraf 08 tahun 1999 mendefinisikan penggabungan usaha (*business combination*) sebagai pernyataan dua atau lebih perusahaan yang terpisah kemudian menjadi kesatuan entitas ekonomi karena satu perusahaan menyatu dengan (*uniting with*) perusahaan lain atau memperoleh kendali (*control*) atas aktiva dan operasi perusahaan lain.

Sedangkan, menurut PSAK 22 (Revisi 2010) menjelaskan definisi dari kombinasi bisnis sebagai berikut.

Kombinasi bisnis adalah suatu transaksi atau peristiwa lain di mana pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atas satu atau lebih suatu bisnis. Transaksi ini kadangkala disebut sebagai “penggabungan sesungguhnya (*true merger*)” atau “penggabungan setara (*merger of equals*)”.

Secara umum, PSAK 22 berisi tentang kombinasi bisnis untuk entitas tidak sependengali. Berdasarkan definisi di atas, memuat beberapa unsur seperti dalam penggabungan usaha terdapat dua atau lebih perusahaan yang terlibat, terjadi pengambilalihan, dan pihak pengakuisisi memperoleh kendali atas perusahaan yang

diakuisisi. Oleh karena itu, pihak yang diakuisisi tidak lagi memiliki kendali atas perusahaan dalam hasil penggabungan usaha.

Sejalan dengan pernyataan di atas, menurut PSAK 22 PP05 mempertegas bahwa pengendalian dapat dilakukan melalui berbagai cara, antara lain: (1) dengan mengalihkan kas, setara kas, atau aset lain (termasuk aset neto yang merupakan suatu bisnis); (2) dengan menimbulkan suatu liabilitas, (3) dengan menerbitkan kepentingan ekuitas, (4) dengan memberikan lebih dari satu jenis imbalan; (5) tanpa mengalihkan imbalan, termasuk yang hanya berdasarkan kontrak.

Di lain sisi, PSAK 38 tentang Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali menyebutkan definisi kombinasi bisnis entitas sepengendali sebagai berikut.

Kombinasi bisnis entitas sepengendali adalah kombinasi bisnis yang seluruh entitas atau bisnis yang bergabung, pada akhirnya dikendalikan oleh pihak yang sama (baik sebelum maupun sesudah kombinasi bisnis) dan pengendaliannya tidak bersifat sementara.

Berdasarkan definisi di atas memuat unsur seperti dalam penggabungan usaha seluruh entitas bisnis saling bergabung, atas penggabungan usaha tersebut kemudian dikendalikan oleh pihak yang sama, dan pengendalian yang tidak bersifat sementara sehingga pihak yang diakuisisi masih berpartisipasi dalam hasil penggabungan usaha.

Sejalan dengan pernyataan di atas, PSAK 38 menjelaskan kembali entitas sepengendali sebagai entitas yang secara langsung maupun tidak langsung (melalui satu atau lebih perantara), mengendalikan atau dikendalikan oleh atau berada di bawah pengendalian yang sama.

## 2.2 Tujuan Kombinasi Bisnis

Menurut Indrawati (2020) menjelaskan bahwa ada beberapa alasan yang melatarbelakangi terjadinya penggabungan usaha :

1. Menghemat Biaya (*Cost Advantage*)

Dengan adanya kombinasi bisnis, maka akan menghemat biaya. Contohnya biaya gaji pegawai dan manajer, serta biaya penelitian dan pengembangan yang lebih murah dibandingkan tanpa kombinasi bisnis.

2. Mengurangi Risiko (*Lower Risk*)

Dengan melakukan kombinasi bisnis terhadap perusahaan yang sudah memiliki produk dan pangsa pasar, maka akan lebih kecil risikonya dibandingkan memasarkan produk baru.

3. Mengurangi Penundaan Beroperasinya Perusahaan (*Fewer Operating Delays*)

Dengan melakukan kombinasi bisnis terhadap perusahaan yang sudah memiliki berbagai fasilitas dan peraturan pemerintah, maka akan lebih cepat untuk beroperasi dan mengembangkan perusahaan.

4. Menghindari Pengambilalihan oleh Perusahaan Lainnya (*Avoidance of Takeovers*)

Dengan melakukan kombinasi bisnis, maka akan menghindari pengambilalihan oleh perusahaan lain, terutama perusahaan kecil.

5. Memperoleh Aset Tidak Berwujud (*Acquisition of Intangible Asset*)

Perusahaan dapat memperoleh aset tak berwujud dari pihak yang diakuisisi seperti hak penambangan, hak paten, *database* pelanggan dan lain-lain.

#### 6. Alasan-Alasan Lain (*Other Reasons*)

Adanya kebanggaan tersendiri oleh suatu perusahaan yang berhasil melakukan penggabungan usaha atau mengakuisisi perusahaan lain.

Selaras dengan tujuan yang telah dipaparkan di atas, menurut Aprilia dan Oetomo (2015) menjelaskan bahwa secara umum tujuan dari dilakukannya kombinasi bisnis adalah memberikan keuntungan bagi entitas, seperti kemampuan dalam pemasaran yang meningkat, riset/penelitian, *skill managerial*, transfer teknologi, dan efisiensi biaya produksi.

### 2.3 Perbedaan PSAK 22 dan PSAK 38

Tabel II.1 menjelaskan tentang perbedaan antara PSAK 22 tentang Kombinasi Bisnis dan PSAK 38 tentang Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali. Berikut di bawah ini dijelaskan terkait perbedaan kedua PSAK tersebut.

Tabel II.1 Perbedaan PSAK 22 dan PSAK 38

PSAK 22	PSAK 38
1. Digunakan pada transaksi kombinasi bisnis entitas tidak sepengendali.	1. Digunakan pada transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali.
2. Dalam pelepasan bisnis entitas tidak sepengendali, mengakui aset dan liabilitas perusahaan berdasarkan nilai wajarnya.	2. Dalam pelepasan bisnis entitas sepengendali, mengakui aset dan liabilitas perusahaan berdasarkan nilai tercatatnya.
3. Selisih antara jumlah imbalan yang diterima dan nilai wajar aset neto	3. Selisih antara jumlah imbalan yang diterima dan nilai tercatat aset neto

diakui sebagai <i>goodwill</i> atau <i>gain on bargain purchase</i> .	diakui sebagai <i>additional paid in capital</i> (tambahan modal disetor).
4. Terdapat pihak yang mengakuisisi lalu memperoleh kendali dan ada pihak yang diakuisisi lalu tidak lagi memiliki kendali.	4. Tidak terdapat pihak yang mengakuisisi atau diakuisisi, tetapi kedua pihak berada di bawah pengendalian yang sama.

Sumber : diolah penulis

Dalam rangka penulisan karya tulis tugas akhir ini, penulis menggunakan PSAK 22 dan PSAK 38 sebagai landasan teori. Hal ini dikarenakan kedua PSAK tersebut sangat cocok dan saling melengkapi untuk pembahasan ke depannya. Selanjutnya, penulis akan menghubungkan PSAK 22 dan PSAK 38 untuk menjelaskan lebih lanjut terkait analisis perlakuan akuntansi merger pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

## **2.4 Strategi dan Bentuk Kombinasi Bisnis**

### **2.4.1 Strategi Kombinasi Bisnis**

Menurut Indrawati (2020), salah satu tujuan perusahaan melakukan kombinasi bisnis adalah untuk mendapatkan efisiensi operasi melalui integrasi, baik secara vertikal maupun horizontal. Selain itu, perusahaan juga dapat mendiversifikasikan terkait risiko usaha melalui konglomerasi. Untuk lebih lengkapnya, berikut di bawah ini tiga strategi kombinasi bisnis yang dilakukan perusahaan.

### 1. Integrasi Horizontal

Integrasi horizontal adalah strategi kombinasi bisnis yang dilakukan dengan cara menggabungkan perusahaan dalam ruang lingkup bisnis yang sama. Contohnya : perusahaan makanan seperti mi instan yang mengakuisisi perusahaan pembuat saus, kecap, maupun perusahaan yang membuat produk dengan bahan baku serupa.

### 2. Integrasi Vertikal

Integrasi vertikal yaitu strategi kombinasi bisnis yang dilakukan dengan cara menggabungkan dua perusahaan atau lebih dengan operasi berbeda secara berturut-turut, seperti tahapan produksi dan distribusi. Bisa juga diartikan penggabungan usaha antara perusahaan yang memiliki hubungan *supplier* atau pemasok, pengolah, dan pengirim. Contohnya : perusahaan kain yang mengakuisisi perusahaan benang lalu disebut integrasi hulu atau perusahaan kain yang mengakuisisi perusahaan pakaian jadi lalu disebut integrasi hilir. Dari contoh tersebut dikatakan integrasi hulu karena suatu perusahaan mengakuisisi perusahaan lain yang tahapan produksinya satu tingkat di atasnya dan disebut integrasi hilir karena suatu perusahaan mengakuisisi perusahaan lain yang tahapan produksinya satu tingkat di bawahnya.

### 3. Konglomerasi

Konglomerasi adalah strategi kombinasi bisnis yang dilakukan dengan cara menggabungkan perusahaan-perusahaan yang produk atau jasa yang dihasilkan serta tidak saling berkaitan. Dari proses penggabungan

perusahaan-perusahaan tersebut dihasilkan yang namanya perusahaan konglomerasi. Perusahaan konglomerasi adalah grup usaha dengan berbagai produk dan jasa yang dihasilkan dan bergerak dalam industri yang berbeda. Contohnya : perusahaan minyak yang mengakuisisi perusahaan otomotif, perusahaan asuransi, dan perusahaan perbankan.

#### **2.4.2 Bentuk Kombinasi Bisnis**

Menurut Indrawati (2020), bentuk kombinasi bisnis dapat ditinjau melalui bagaimana bentuk perusahaan tersebut sebelum dan setelah terjadinya penggabungan usaha. Untuk lebih jelasnya, berikut di bawah ini tiga bentuk dari kombinasi bisnis.

##### **1. Akuisisi (*Stock Acquisition*)**

Akuisisi adalah bentuk kombinasi bisnis yang terjadi apabila perusahaan mengakuisisi perusahaan lain, tetapi perusahaan yang diakuisisi tetap beroperasi hanya saja kendali berpindah ke perusahaan yang mengakuisisi. Pihak pengakuisisi disebut entitas *holding* memiliki kewajiban untuk membuat laporan keuangan konsolidasian dengan mengompilasi seluruh aset dan liabilitas dari semua entitas yang berada di bawah kendali.

Contoh dari akuisisi yaitu Semen Gresik sebagai pihak pengakuisisi melakukan pembelian terhadap sebagian besar saham milik Semen Padang. Oleh karena itu, Semen Gresik memiliki kekuasaan terhadap manajemen Semen Padang dan operasi dari dua perusahaan tersebut tetap berjalan masing-masing seperti biasa.

## 2. Merger (*Statutory Merger*)

Merger adalah bentuk kombinasi bisnis yang terjadi ketika dua atau lebih perusahaan bergabung, lalu perusahaan yang diakuisisi dibubarkan serta seluruh aset dan liabilitasnya diambilalih oleh perusahaan yang mengakuisisi. Dalam proses merger itu sendiri, baik perusahaan pengakuisisi maupun perusahaan yang diakuisisi tetap berdiri.

Contoh dari merger yaitu yang dilakukan antara Bank Lippo dan Bank Niaga pada tahun 2008. Dari proses merger tersebut, Bank Niaga sebagai pihak pengakuisisi yang mengambilalih aset dan liabilitas dari Bank Niaga. Hasil dari merger tersebut, kemudian kedua perusahaan menyetujui penggantian nama menjadi Bank CIMB Niaga.

## 3. Konsolidasi (*Statutory Consolidation*)

Kondolidasi adalah bentuk kombinasi bisnis ketika dua atau lebih perusahaan bergabung dan masing-masing melebur menjadi suatu bentuk perusahaan yang baru. Perusahaan baru dari hasil penggabungan tersebut kemudian yang mengambilalih seluruh aset dan liabilitas dari perusahaan yang dibubarkan.

Contoh dari konsolidasi yaitu yang dilakukan antara Bank Exim, Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, dan Bapindo. Dari hasil konsolidasi keempat bank tersebut berubah menjadi Bank Mandiri. Hal yang melatarbelakangi terjadinya konsolidasi keempat perusahaan tersebut saat krisis ekonomi yang menerpa Indonesia. Sebagai upaya untuk melindungi perusahaan dari kebangkrutan dan didukung dengan adanya motif yang sama

dalam meraih tujuan bersama, maka keempat bank tersebut bersatu padu dan melakukan kerja sama konsolidasi.

## **2.5 Metode Pencatatan Akuntansi Kombinasi Bisnis**

Dalam proses kombinasi bisnis, menurut PSAK 22 (Revisi 2014) mengamankan pencatatan transaksi dengan menggunakan metode pembelian atau metode akuisisi. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, di bawah ini dua jenis metode pencatatan dalam kombinasi bisnis.

### **1. Metode *Pooling of Interest* (Penyatuan Kepentingan)**

Menurut Indrawati (2020), dalam metode *pooling of interest* masing-masing pihak saling menyatukan kepentingan bisnisnya sehingga tidak diperlukan penilaian kembali atas aset dan liabilitas perusahaan yang bergabung. Ciri khas yang membedakan metode lain, pada metode *pooling of interest* dasar pencatatannya menggunakan nilai buku atau nilai tercatat aset dan liabilitas perusahaan yang bergabung. Metode ini diperuntukkan bagi perusahaan yang menerapkan kombinasi bisnis entitas sepengendali yang diatur lebih spesifik pada PSAK 38. Metode ini paling tepat digunakan pada kombinasi bisnis entitas sepengendali karena tidak terjadi perubahan kepemilikan dari pihak yang mengendalikan sehingga nilai buku sebagai dasar pencatatan menjadi lebih tepat.

### **2. Metode *Purchase* (Pembelian/Akuisisi)**

Metode pembelian/akuisisi adalah metode pencatatan akuntansi kombinasi bisnis yang saat ini berlaku dan penggunaannya diatur dalam PSAK 22. Dalam PSAK 22, metode pembelian/akuisisi menggunakan nilai wajar sebagai dasar

pencatatannya karena nilai wajar yang digunakan adalah nilai wajar saat tanggal akuisisi. Menurut Indrawati (2020), menjelaskan bahwa metode pembelian/akuisisi dilakukan karena kombinasi bisnis adalah pembentukan perusahaan baru sehingga perlu adanya penilaian atas aset dan liabilitas perusahaan yang bergabung. Pencatatan aset dan liabilitas menggunakan nilai wajar dapat menimbulkan *goodwill* bagi perusahaan setelah kombinasi bisnis.

## **2.6 Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan pada Kombinasi Bisnis**

### **2.6.1 Penyajian Selisih Imbalan dan Jumlah Tercatat**

Menurut PSAK 38 DK07, selisih yang ditimbulkan dari jumlah imbalan yang dialihkan dan jumlah tercatat aset neto dalam kombinasi dan pelepasan bisnis entitas sepengendali disajikan pada pos ekuitas. Dalam PSAK 38 DK08 dijelaskan lebih spesifik bahwa selisih imbalan dan jumlah tercatat disajikan pada pos ekuitas tersendiri. Alternatif lain yaitu selisih antara jumlah imbalan dan jumlah tercatat disajikan pada : (a) *additional PIC*/tambahan modal disetor; (b) penghasilan komprehensif lain; (c) *additional PIC*/tambahan modal disetor jika selisih positif dan saldo laba jika selisih negatif. Namun, dalam PSAK 38 DK09 menjelaskan bahwa penyajian selisih pada pos ekuitas tersendiri dinilai tidak konsisten dengan substansinya sebagai bagian dari suatu transaksi ekuitas, demikian halnya yang terjadi pada poin (b). Selain itu, alternatif pada poin (c) juga dinilai tidak konsisten karena suatu transaksi memiliki perlakuan yang berbeda sebagai transaksi ekuitas dalam suatu kondisi tertentu, tetapi tidak sebagai transaksi ekuitas dalam kondisi lain. Alternatif lain lebih menekankan pada aspek hukum perusahaan yang terkait agio dan disagio. Kemudian, pada PSAK 38 DK10 menerangkan bahwa DSAK IAI

memutuskan untuk menyajikan selisih tersebut pada pos tambahan modal disetor yaitu pada poin (a). Hal ini dikarenakan kombinasi bisnis entitas sepengendali adalah transaksi ekuitas. Larangan secara hukum untuk disagio dilihat hanya terkait dengan setoran awal modal sehingga selisih negatif dari kombinasi bisnis entitas sepengendali yang disajikan pada pos *additional PIC*/tambahan modal disetor tidak relevan dengan dengan masalah disagio. Selain itu, *additional PIC*/tambahan modal disetor tidak hanya terkait agio dan disagio.

### **2.6.2 Hubungan dengan PSAK 1**

PSAK 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan mengatur bahwa apabila dalam kondisi tertentu dilakukan kembali penyajian terhadap laporan keuangan, maka perusahaan perlu menyajikan tambahan laporan posisi keuangan awal periode komparatif. Jika dikaitkan dengan PSAK 38 yang pencatatannya menggunakan metode *pooling of interest* (penyatuan kepemilikan), DSAK IAI memberikan konfirmasi bahwa apabila penggabungan terhadap berbagai aspek laporan keuangan dari entitas yang bergabung dilakukan sebelum periode berjalan, maka menggunakan PSAK 1 sebagai dasar penerapannya sehingga entitas wajib menyajikan tambahan laporan posisi keuangan awal periode komparatif. Akan tetapi, jika penggabungan terhadap aspek-aspek laporan keuangan dari entitas yang bergabung dilakukan pada saat awal periode berjalan, maka tidak mengakibatkan entitas menyajikan tambahan laporan posisi keuangan seperti yang dijelaskan pada PSAK 1.

### **2.6.3 Pengungkapan atas Laporan Keuangan**

Menurut PSAK 38 paragraf 17 menjelaskan bahwa untuk seluruh transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali, pengungkapan di bawah ini disajikan dalam laporan keuangan pada periode terjadinya kombinasi bisnis :

1. Nama dan penjelasan tentang entitas atau bisnis yang berkombinasi;
2. Penjelasan mengenai hubungan kesepengendalian dari entitas-entitas yang berinteraksi dan bahwa hubungan tersebut tidak bersifat sementara;
3. Tanggal efektif transaksi;
4. Operasi atau kegiatan bisnis yang telah diputuskan untuk dijual atau dihentikan akibat kombinasi bisnis tersebut;
5. Kepemilikan entitas atau bisnis yang dialihkan serta jenis dan jumlah imbalan yang terjadi;
6. Jumlah tercatat bisnis yang dikombinasikan atau yang dilepas serta selisih antara jumlah tercatat bisnis tersebut dan jumlah imbalan yang dialihkan atau imbalan yang diterima; dan
7. Pengungkapan mengenai penyajian kembali laporan keuangan sebagaimana dijelaskan di paragraf 12 yang dapat memberikan informasi minimal meliputi:
  - a. Ikhtisar angka-angka laporan keuangan yang telah dilaporkan sebelumnya untuk periode yang disajikan kembali;
  - b. Ikhtisar dari jumlah tercatat aset dan liabilitas entitas atau bisnis yang dikombinasikan;

- c. Dampak penyesuaian kebijakan akuntansi sebagaimana yang dijelaskan di paragraf 13;
- d. Ikhtisar angka-angka laporan keuangan setelah disajikan kembali.

## **2.7 Laporan Keuangan Konsolidasian**

Menurut PSAK 65 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian memberikan definisi bahwa laporan keuangan konsolidasian adalah laporan keuangan kelompok usaha yang terdiri dari aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas milik entitas induk dan entitas anak yang disajikan sebagai suatu entitas ekonomi tunggal.

Selaras dengan pernyataan di atas, dalam PSAK 65 PP86 poin (b) menjelaskan bahwa laporan keuangan konsolidasian mengeliminasi jumlah tercatat dari investasi entitas induk di setiap entitas anak begitupun sebaliknya. Pada poin (c) menambahkan bahwa laporan keuangan konsolidasian juga mengeliminasi transaksi antar entitas dalam kelompok usaha yang meliputi laba/rugi yang timbul. Contohnya adalah transaksi antar perusahaan terkait persediaan, aset tetap, obligasi, dan lain-lain. Kerugian dalam kelompok usaha menandakan adanya penurunan nilai yang mensyaratkan pengakuan dalam laporan keuangan konsolidasian.

PSAK 65 PP88 menjelaskan terkait pengukuran laporan keuangan konsolidasian. Entitas memasukkan penghasilan dan beban entitas anak dari tanggal diperolehnya pengendalian sampai dengan entitas kehilangan pengendalian terhadap entitas anak. Penghasilan dan beban didasarkan pada jumlah aset neto pada saat diakuisisi. Contohnya : beban depresiasi yang diakui setelah tanggal akuisisi berdasarkan nilai wajar aset.

## 2.8 Analisis Efisiensi Perusahaan

### 2.8.1 Metode *Data Envelopment Analysis*

Menurut Hadad (2003) memberikan definisi efisiensi yaitu salah satu parameter yang secara teoritis mendasari seluruh kinerja organisasi. Efisiensi dalam perusahaan perbankan adalah salah satu parameter kinerja yang cukup populer. Hadad (2003) juga menjelaskan metode yang digunakan untuk memprediksi efisiensi pada perusahaan perbankan telah banyak dikembangkan. Secara umum, ada dua pendekatan yang biasa digunakan, yaitu parametrik dan non-parametrik. Pendekatan parametrik digunakan untuk melihat adanya hubungan antar biaya. Pengetahuan tentang bentuk *stochastic cost* atau *profit frontier*, dan struktur *error term* digunakan dalam perhitungan pendekatan parametrik. Sampel yang diperlukan juga harus mencukupi guna menghasilkan kesimpulan secara statistik (*statistical inferences*). Bentuk dari pendekatan parametrik terdiri dari dua jenis, yaitu *Stochastic Frontier Approach* (SFA) dan *Distribution Free Approach* (DFA).

Pada pendekatan non-parametrik menggunakan *production frontier* dalam perhitungannya. Salah satunya adalah metode *Data Envelopment Analysis* (DEA) yang menjadi fokus dalam penulisan karya tulis tugas akhir ini. Melalui pendekatan DEA, maka perhitungan tidak memerlukan banyak informasi sehingga asumsi dan data yang diperlukan lebih sedikit. Jika menggunakan pendekatan non-parametrik, maka konsekuensinya tidak dapat diambil keputusan secara statistik. Selain itu, penggunaan metode ini juga tidak melibatkan *error term* dalam perhitungannya sehingga dengan metode DEA hanya digunakan untuk mengukur seberapa besar tingkat efisiensi secara umum.

Penelitian awal mengenai metode DEA ini dilakukan oleh Charnes. Menurut Charnes (1978) menjelaskan bahwa dalam metode DEA terdapat berbagai unit pembuat keputusan yang berbeda yang disebut DMU (*Different Decision Making Unit*). Dari setiap DMU tersebut terdiri dari berbagai input yang kemudian diharapkan dapat menghasilkan berbagai output. Hal yang mendasar pada metode DEA yaitu skor efisiensi teknis pada setiap DMU selalu dipertimbangkan sehingga menghasilkan hasil yang relatif bukan absolut. Tingkat efisiensi relatif yang dimaksud adalah kondisi yang terjadi belum tentu mencerminkan tingkat efisiensi yang sesungguhnya. Dalam artian bank yang memiliki tingkat efisiensi lebih baik belum tentu efisien, tetapi bisa jadi memang sesungguhnya efisien. Efisiensi teknis memiliki peranan penting karena rasio yang baik pada setiap input dan outputnya. Hal tersebut menunjukkan signifikansi dari hubungan input dan output yang diukur.

Selaras dengan penjelasan di atas, Cooper (2005) menjelaskan bahwa ada dua jenis kondisi efisiensi yang dialami oleh bank yaitu *Full/Strong Efficiency* dan *Weak Efficiency*. Untuk kondisi *full/strong efficiency* harus memenuhi dua syarat yaitu : (1)  $\theta_t$  bernilai positif yang nilainya = 1 dan (2) slack memiliki nilai = 0. Sedangkan, untuk *weak efficiency* sendiri terjadi jika syarat (1) tidak terpenuhi dengan nilai  $\theta_t < 1$ . Suatu bank dengan DMU yang *efficiency score* ( $\theta_t$ ) mendekati 1, maka semakin efisien. Sedangkan, DMU yang *efficiency score* ( $\theta_t$ ) < 1 digambarkan sebagai DMU yang tidak efisien.

### **2.8.2 Teori Input dan Output pada Perusahaan Perbankan**

Pendekatan dengan metode DEA secara statistik konsisten dengan struktur produksi dan distribusi. Namun, seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa

pendekatan non-parametrik yaitu metode DEA tidak dapat mengestimasi adanya *error term*, khususnya jika variabel input dan output relatif lebih banyak dibandingkan banyaknya observasi. Menurut Hadad (2003) menjelaskan bahwa konsep yang digunakan pada input dan output perusahaan perbankan yaitu : (1) pendekatan produksi (*production approach*); (2) pendekatan intermediasi (*intermediation approach*); dan (3) pendekatan aset (*asset approach*).

Secara lebih rinci Hadad (2003) menjelaskan masing-masing dari ketiga pendekatan tersebut. Pendekatan produksi yaitu memandang perusahaan perbankan sebagai produsen dari akun deposit (*deposit accounts*) dan kredit pinjaman (*loans*). Dalam hal ini, output didefinisikan sebagai penjumlahan dari akun-akun tersebut atau yang berasal dari transaksi terkait. Sedangkan, input didefinisikan sebagai jumlah dari tenaga kerja, pengeluaran modal terhadap aset tetap dan material lain.

Pendekatan intermediasi yaitu melihat perusahaan perbankan sebagai intermediasor yang mentransfer aset-aset finansial dari unit-unit surplus menjadi unit-unit defisit. Dalam pendekatan ini input terdiri dari biaya tenaga kerja, modal, dan pembayaran bunga pada deposit. Sedangkan output terdiri dari kredit pinjaman (*loans*) dan investasi finansial (*financial investment*).

Pendekatan aset yaitu memandang fungsi primer dari suatu perusahaan perbankan sebagai pembuat kredit pinjaman (*loans*). Sesuai dengan namanya, pendekatan aset ini benar-benar mendefinisikan output ke dalam bentuk aset. Menurut penelitian oleh Hadad (2003) yang juga menggunakan pendekatan aset menjelaskan bahwa variabel input terdiri dari hal berikut : (1) P1 (*Price of Labour*) yaitu beban personalia dibagi total aset; (2) P2 (*Price of Funds*) yaitu beban bunga

dibagi total aset; (3) P3 (*Price of Physical Capital*) yaitu beban lainnya dibagi aset tetap. Data dari variabel input tersebut bersumber dari laporan laba rugi dan neraca keuangan dari bank-bank publikasi.

Di satu sisi, variabel output dari pendekatan aset meliputi hal berikut : (1) Q1 yaitu kredit yang diberikan pihak terkait dengan bank; (2) Q2 (*Public Loans*) yaitu kredit yang diberikan kepada pihak lainnya; (3) Q3 (*Securities*) yaitu surat berharga yang dimiliki. Data dari variabel output tersebut bersumber dari neraca keuangan bank-bank publikasi.

### **2.8.3 Kelebihan dan Kekurangan Metode *Data Envelopment Analysis***

Menurut Charnes (1978) menjelaskan bahwa kelebihan dari penggunaan teknik non-parametrik yaitu metode DEA yaitu mampu menghadapi kasus input yang bermacam-macam seperti faktor yang berada di luar kendali manajemen. Selain itu, penggunaan metode DEA mampu meminimalisasi adanya kesulitan yang muncul dari penggunaan metode parametrik dalam menganalisis rasio keuangan. Adanya aplikasi dalam penggunaan metode DEA memudahkan perbandingan efisiensi dengan kriteria yang seragam.

Selain kelebihan yang dimiliki, penggunaan metode DEA juga memiliki kelemahan. Menurut Santoso (2010) menjelaskan bahwa kelemahan dari penggunaan metode DEA yaitu adanya satu *outlier* saja dapat secara signifikan mempengaruhi perhitungan efisiensi dari setiap perusahaan.

## **2.9 Analisis Rasio Profitabilitas Perusahaan**

Dalam mendukung topik karya tulis tugas akhir ini sekaligus untuk melengkapi penjelasan terkait analisis-analisis sebelumnya, maka pada bagian ini dijelaskan

terkait analisis rasio profitabilitas perusahaan. Rasio profitabilitas yang digunakan pada karya tulis tugas akhir ini terdiri dari empat jenis rasio, yaitu ROA, ROE, NPM, dan BOPO. Penjelasan secara rinci terkait keempat jenis rasio tersebut adalah sebagai berikut.

#### 1. ROA (*Return on Asset*)

Menurut Bank Indonesia (SE BI No.10/46/Dint. 2008) menjelaskan bahwa *return on asset* adalah rasio yang menggambarkan tingkat keuntungan yang diperoleh manajemen terhadap total aset yang dimiliki. Selain itu, rasio ini juga dapat digunakan untuk mengukur efisiensi terhadap kemampuan kinerja suatu perusahaan perbankan atau dalam mengelola biaya, baik operasional maupun non operasional. Rasio ROA dapat dirumuskan sebagai berikut.

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Tabel II.2 di bawah ini menjelaskan tentang kriteria penilaian ROA menurut Bank Indonesia.

Tabel II.2 Kriteria Penilaian ROA

Peringkat	Rasio	Kriteria
1	ROA > 1,5%	Sangat Sehat
2	1,25% < ROA ≤ 1,5%	Sehat
3	0,5% < ROA ≤ 1,25%	Cukup Sehat
4	0% < ROA ≤ 0,5%	Kurang Sehat
5	ROA ≤ 0%	Tidak Sehat

Sumber : Lampiran Surat Edaran BI No. 13/24/DPNP/2011 (diolah)

## 2. ROE (*Return on Equity*)

Menurut Bank Indonesia (SE BI No.10/46/Dint. 2008) menjelaskan bahwa *return on equity* adalah rasio yang menggambarkan tingkat pengembalian yang diperoleh manajemen atas modal yang diinvestasikan oleh pemegang saham. Rasio ROE yang semakin tinggi, maka semakin baik begitu pula sebaliknya. Adanya ROE yang tinggi memiliki dampak yang positif terhadap perusahaan perbankan terutama dalam mendorong penerimaan bank. Rasio ini juga mempengaruhi minat investor untuk melakukan jual beli saham sehingga volume penjualan akan meningkat. Rasio ROE dapat dirumuskan sebagai berikut.

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Ekuitas}} \times 100\%$$

Tabel II.3 di bawah ini menjelaskan tentang kriteria penilaian ROE menurut Bank Indonesia.

Tabel II.3 Kriteria Penilaian ROE

Peringkat	Rasio	Kriteria
1	ROE > 23%	Sangat Sehat
2	18% < ROE ≤ 23%	Sehat
3	13% < ROE ≤ 18%	Cukup Sehat
4	8% < ROE ≤ 13%	Kurang Sehat
5	ROE ≤ 8%	Tidak Sehat

Sumber : Lampiran Surat Edaran BI No. 13/24/DPNP/2011 (diolah)

### 3. NPM (*Net Profit Margin*)

Menurut Bank Indonesia (SE BI No.10/46/Dint. 2008) menjelaskan bahwa net profit margin adalah rasio yang menggambarkan kontribusi penjualan (*sales*) terhadap laba bersih yang dihasilkan. Rasio NPM memberikan interpretasi bahwa kemampuan bank dalam menekan biaya-biaya perusahaan pada periode tertentu. Rasio NPM dapat dirumuskan sebagai berikut.

$$\text{NPM} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

Tabel II.4 di bawah ini menjelaskan tentang kriteria penilaian NPM menurut Bank Indonesia.

Tabel II.4 Kriteria Penilaian NPM

Peringkat	Rasio	Kriteria
1	$\text{NPM} \geq 100\%$	Sangat Sehat
2	$81\% \leq \text{NPM} < 100\%$	Sehat
3	$66\% \leq \text{NPM} < 81\%$	Cukup Sehat
4	$51\% \leq \text{NPM} < 66\%$	Kurang Sehat
5	$\text{NPM} < 51\%$	Tidak Sehat

Sumber : Lampiran Surat Edaran BI No. 13/24/DPNP/2011 (diolah)

### 4. BOPO (Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional)

Sesuai dengan namanya, maka rasio tersebut diperoleh melalui pembagian beban operasional dengan pendapatan operasional. Rasio ini merupakan salah satu rasio yang menggambarkan tingkat efisiensi perusahaan. Semakin kecil rasio BOPO, maka semakin efisien suatu bank dalam mengendalikan biaya operasionalnya. Rasio BOPO dapat dirumuskan sebagai berikut.

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Total Biaya Operasional}}{\text{Total Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

Tabel II.5 di bawah ini menjelaskan tentang kriteria penilaian BOPO menurut Bank Indonesia.

Tabel II.5 Kriteria Penilaian BOPO

Peringkat	Rasio	Kriteria
1	$\text{BOPO} \leq 83\%$	Sangat Sehat
2	$83\% < \text{BOPO} \leq 85\%$	Sehat
3	$85\% < \text{BOPO} \leq 87\%$	Cukup Sehat
4	$87\% < \text{BOPO} \leq 89\%$	Kurang Sehat
5	$\text{BOPO} \geq 89\%$	Tidak Sehat

Sumber : Lampiran Surat Edaran BI No. 13/24/DPNP/2011 (diolah)

## 2.10 Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik bahasan KTTA ini dilakukan oleh Siti Maimunah dan Furqon Andhika Darmawan yaitu tentang analisis penyajian dan pengungkapan kombinasi bisnis pada PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) untuk periode 2012 – 2014. Hasil dari penelitian membahas bahwa menurut PSAK 22 Revisi 2010 masih ditemukan penyajian yang kurang tepat dan seharusnya disertakan dalam *goodwill*. Untuk laporan keuangannya, penyajian dan pengungkapan dalam CaLK dinilai kurang lengkap dan jelas dalam memvisualisasikan kombinasi bisnis perusahaan. Informasi yang cukup, wajar, dan lengkap sangat dibutuhkan sehingga laporan keuangan tidak menyesatkan.

Penulisan yang terkait dengan topik KTTA ini juga dilakukan oleh Lida Puspaningtyas dalam berita harian Republika yang membahas tentang tujuh alasan

pentingnya merger bank syariah BUMN atau dalam hal ini bank swasta nasional. Dalam penulisan tersebut disampaikan salah satu tujuan adanya merger adalah membuat bank syariah menjadi lebih efisien dalam mengelola dana dan belanja. Terkait pernyataan tersebut menjadi alasan penulis untuk membahas lebih lanjut tentang analisis efisiensi.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Hanif Pradipta dan Bryan Zaharias yang membahas tentang estimasi dari adanya merger terhadap efisiensi perbankan dengan sampel yang diambil adalah beberapa bank yang merger pada tahun 2002 – 2013. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa berdasarkan estimasi, bank menjadi lebih efisien setelah melakukan merger. Selain itu, adanya inefisiensi dapat diperbaiki dengan saling memberikan informasi tentang pengelolaan dana yang baik sehingga mengurangi beban bunga dan operasional perusahaan.

Penelitian yang serupa juga dilakukan oleh Ruddy Tri Santoso yang membahas pengaruh merger terhadap efisiensi perbankan pada tahun 1998 – 2009. Hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa adanya merger membuat bank semakin kuat menghadapi krisis ekonomi yang terjadi karena besarnya struktur permodalan yang dimiliki. Efisiensi yang dilakukan dalam penelitian tersebut menggunakan metode non-parametrik DEA. Selain membahas efisiensi, penelitian tersebut juga mengkaitkannya dengan rasio profitabilitas. Penelitian tersebut menggunakan beberapa rasio penting, seperti ROA, ROE, NPM, NIM, dan juga BOPO. Terkait krisis ekonomi yang terjadi saat itu, penelitian tersebut menggunakan rasio NIM dan BOPO.